

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009), pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan salah satu cara untuk melibatkan masyarakat dan membawa berbagai dampak terhadapnya, bahkan pariwisata juga memiliki energi yang kuat yang dapat memberikan banyak dampak bagi masyarakat setempat. Serta membuat masyarakat sekitar mengalami perubahan berbagai dampak yang tidak diharapkan. Salah satunya semakin buruknya kesenjangan pendapatan atau penghasilan antara masyarakat setempat, hal ini menjadikan sebuah ekonomi yang timpang. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan pemberdayaan yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama untuk konteks paradigma baru pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan.

Pariwisata yang saat ini sedang digemari oleh wisatawan adalah pariwisata pedesaan. Dimana pariwisata pedesaan memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi yang terbaik dan dukungan bagi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan pariwisata pedesaan seringkali terhambat oleh berbagai masalah, baik dari pemerintah, yang dibantu keterlibatan akademisi, dan keterlibatan masyarakat. Sejalan dengan dinamika kepariwisataan, hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Suranny (2020) kemajuan pariwisata merambah ke berbagai terminologi seperti, *sustainable*

*tourism development, village tourism, ecotourism*, adalah pendekatan pengembangan kepariwisataan yang bertujuan untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Pendekatan pengembangan pariwisata yang dilakukan salah satunya adalah melalui desa wisata dengan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan pada sektor pariwisata.

Kejenuhan dengan pola wisata yang monoton membuat adanya keinginan untuk kembali menikmati keindahan dan kearifan lokal pada kehidupan di pedesaan, dan juga berinteraksi dengan masyarakat lokal melalui aktifitas sosial budayanya yang dijadikan sebagai daya tarik pariwisata di daerah- daerah pedesaan yang dikemas dengan sedemikian rupa dalam bentuk desa wisata. Nuryanti dalam jurnal Masitah, (2019) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara antraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi serta kebiasaan yang berlaku. Desa wisata adalah tempat wisata yang memiliki keunikan atau ciri khusus untuk menjadi tempat tersebut sebagai tujuan wisata. Ada banyak ciri khusus yang dapat dijadikan sebagai simbol untuk menjadikan satu daerah menjadi kawasan desa wisata, yaitu dari budaya yang dimiliki desa, makanan tradisional, cara bertani atau sistem bercocok tanam, dan juga sistem sosial budaya yang dianut desa tersebut.

Desa wisata dapat dibentuk dengan melestarikan nilai kearifan lokal, serta meningkatkan potensi alam yang dimiliki oleh desa. Semua ini dilakukan untuk memajukan perekonomian masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memprioritaskan perekonomian masyarakat desa

secara keseluruhan. Idealnya program pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan dilakukan tidak hanya sekali, maka penting dalam menjaga aspek keberlanjutan tujuan tercapai secara maksimal. Mengingat banyaknya permasalahan yang ada pada proses pengembangan desa wisata, masyarakat menjadi sasaran dalam program pemberdayaan.

Hal utama dalam mewujudkan desa wisata adalah pola hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Produk desa berupa hasil pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan merupakan potensi desa yang menjadi ciri khas desa wisata, dimana hal tersebut menjadi tujuan utama wisatawan untuk berkunjung. Pada pembanguana desa, hal penting yang harus diperhatikan adalah melakukan usaha untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Seperti dengan pembangunan wisata desa yang sedang diminati wisatawan saat ini sehingga berpotensi untuk menarik pengunjung yang akan datang untuk menjadi wisatawan, baik lokal maupun luar kota. Keadaan desa yang dikelilingi dengan banyak villa, baik dipakai untuk keluarga atau dipakai untuk kegiatan outbond dan wisata-wisata lainnya menjadikan nilai tambah bagi desa wisata. Begitu juga pada kondisi Desa Ketapanrame yang memiliki potensi alam sebagai desa wisata, yaitu Taman Ganjaran yang berada di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Ganjaran adalah nama tempat yang dijadikan sebagai desa wisata. Kata ganjaran berasal dari nama tempat tersebut. Tempat yang dimaksud adalah tanah kas desa yang dipakai oleh perangkat desa untuk memberikan tambahan gaji. Namun tingkat kesuburan tanah ganjaran tersebut sangatlah kecil. Seiring berjalannya waktu akhirnya perangkat desa merelakan hak mereka kepada

masyarakat yaitu memberikan lahan milik perangkat desa untuk dijadikan sebagai usaha. Selanjutnya tanah kas desa tersebut dikelola dan dijadikan sebagai tempat wisata yang disebut Wisata Taman Ganjaran.

Awal Pengembangan Wisata Taman Ganjaran ini dimulai karena Kepala Desa Ketapanrame menginginkan agar Desa Ketapanrame memiliki lambang yang akan mewakili desanya dengan baik, dan dapat diketahui oleh semua orang. Sekaligus dapat menambah PAD Desa. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa adanya aset tanah kas (milik) desa yang diberikan untuk dijadikan usaha, dari sinilah adanya ide dan pemikiran untuk menjadikan lahan tersebut sebagai *rest area* atau wahana rekreasi yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan perekonomian masyarakat. sehingga konsep tersebut diajukan ke Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan dukungan berupa bantuan, yaitu konsep mengenai Taman Ganjaran, yang akan diisi dengan kolam renang, gedung pertemuan di depan Balai Desa Ketapanrame, *rest area*, serta *food court* atau sejenis pujasera dan pasar buah.

Melalui rencana pembangunan tersebut, Desa Ketapanrame telah menerima 5M dari daerah, dana tersebut diperoleh dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk mengelola lahan kosong yang dihibahkan Kepada Desa untuk dikelola. Dari dana tersebut Ketua BUMDes memiliki ide untuk mewujudkan Taman yang nantinya sebagai *icon* dari Ketapanrame. Akhirnya melalui dana yang diperoleh, perangkat desa melakukan rencana pembangunan di tahun pertama fokus pada Taman Ghanjaran terlebih dahulu, kemudian pada tahun kedua adalah pembangunan kolam renang, lalu pada tahun ketiga pembuatan *rest area*, pasar buah, dan gedung pertemuan. Awal pembangunan Taman Ghanjaran ini perangkat

desa berharap mendapat ganjaran pahala atas pengabdian tersebut. Oleh karena itu dibangunlah sebuah patung pahala yang berukuran besar di Taman Ganjaran sebagai simbol atau pertanda.

Pengembangan wisata melalui Taman Ganjaran dinilai sangat efektif serta membawa perubahan yang baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah Desa Ketapanrame dan masyarakat menyadari dengan keberadaan desa yang terletak didataran tinggi pegunungan memiliki potensi yang unggul apabila dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Taman Ganjaran diresmikan pada tanggal 8 Desember 2018 oleh Bupati Mojokerto. Satu bulan sebelumnya sudah diresmikan terlebih dahulu untuk *stand* dan *food court* di sekitar area Taman Ganjaran. Hal tersebut dilakukan karena menurut perangkat desa apabila peresmian dilakukan secara bersama, maka tidak ada pengembangan yang terjadi, ini merupakan strategi pemerintah Desa Ketapanrame dan masyarakat dalam menarik antusias pengunjung yang penasaran dengan desa wisata di Ketapanrame.

Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda serta cara pengelolaan yang berbeda pula. Potensi tersebut yang dulunya belum terjamah kini telah dapat diakses akibat dorongan dari berbagai pihak, baik perangkat desa maupun masyarakat setempat yang ikut serta didalamnya. Seperti halnya Desa Ketapanrame yang memiliki ide kreatif untuk menjadikan sebuah Taman Ganjaran. Perkembangan tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk maju dan menjadikan desa yang lebih baik.

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Keistimewaan desa terletak pada wewenang otonomi dan tata pemerintahannya yang diatur dan dikelola berdasarkan hak dan asa-usul adat istiadat setempat. Sehingga desa memiliki kebebasan dalam mengelola dan mengembangkan desanya dengan kreatif mungkin, seperti Ketapanrame yang mengembangkan desanya dengan bantuan dari perangkat desa dan masyarakat setempat yang saling mendukung. Dalam perencanaan pembangunan wisata tentu perangkat desa tidak dapat mengelola dengan seorang diri. Terdapat pihak-pihak terkait yang ikut serta dalam pembangunan desa wisata. Dalam mengembangkan Wisata Taman Ganjaran tidak luput dari modal serta bantuan dari berbagai hal lainnya untuk meningkatkan minat wisatawan. Sehingga diperlukan manajemen pengelolaan yang benar, yaitu melalui peran BUMDes.

BUMDes berperan dalam pengelolaan dan mengembangkan wisata desa yaitu Wisata Taman Ganjaran. Dengan pengelolaan potensi yang baik dari perangkat desa dan masyarakat diharapkan dapat memajukan serta meningkatkan perekonomian desa. Sehingga dikembangkanlah potensi desa wisata tersebut dengan membuka wisata berbasis desa dengan mengunggulkan pesona keindahan alam. Diantaranya pemandian, *waterpark*, taman bermain, *rest area*, serta rumah warga yang dapat dijadikan *homestay* bagi pengunjung luar kota yang hendak menikmati keindahan alam dari Desa Ketapanrame.

Pembentukan BUMDes sangat didorong pemerintah, mengingat peran BUMDes memiliki potensi kemajuan yang sangat pesat terhadap perekonomian untuk masa yang akan datang. Pemerintah mendorong untuk pengembangan desa

wisata melalui BUMDes, berdasarkan pemaparan Suparji (2019) badan usaha tersebut dibentuk untuk membantu pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6//2014 tentang Desa ( UU Desa). Pasal 87 UU Desa dan pasal 132 PP No.43/2014 menjelaskan bahwa setiap desa diberi peluang yang sama untuk mendirikan BUMDes. Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk memfasilitasi desa dalam mengelola dana dan keuangan desa kedepannya. Desa akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan jika tidak ada bantuan dari BUMDes. Sehingga adanya BUMDes merupakan sektor penggerak industri baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Dana yang dikelola oleh BUMDes untuk ekonomi dan pelayanan dasar berasal dari pemerintah pusat ataupun daerah.

BUMDes Ketapanrame sejatinya telah berdirinya sejak tahun 2004 silam. Berawal dari masalah pembagian air minum untuk kebutuhan masyarakat yang kurang penataan, padahal mata air yang dimiliki desa sangatlah banyak dan cukup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pertengahan 1978 ABRI Masuk Desa (AMD) serta masyarakat gotong royong melakukan pembangunan jaringan pipa dan penampung air minum dari aliran SUMBERBEJO ke pemukiman warga dusun Ketapanrame. Hasil dari pembangunan pipa dan bak tersebut dapat mempermudah penyaluran air minum kerumah-rumah masyarakat setempat.

Melalui pembentukan BUMDes diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga bisnis desa yang dapat memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat dan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa. Selain itu, BUMDes juga mampu menjadi wadah bagi masyarakat dalam

menuangkan ide kreatif guna mengembangkan potensi desa untuk dijadikan tempat wisata. BUMDes sebagai tulang punggung desa yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa, dan harapannya dapat memajukan desa, untuk mempercepat maksud dan tujuan program pembangunan desa sejalan dengan visi yang telah diambil oleh pemerintah desa dengan pertimbangan tersebut, pada tahun 2008, dilakukan revitalisasi BUMDes dengan ditetapkannya Peraturan Desa Ketapanrame Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sektor Pengelolaan Air Minum Desa.

Tumbuhnya semangat dan dorongan masyarakat, menjadi perhatian serius bagi pemerintah desa untuk melakukan upaya pembenahan dan perbaikan dengan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapabilitas kelembagaan dalam menjalankan program tersebut. Hal ini dirasa perlu bagi BUMDes untuk berkembang dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya sebagai penggerak roda perekonomian desa secara keseluruhan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan Peraturan Desa No 5 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Ketapanrame) dalam jurnal Hadi (2021) mengenai peraturan BUMDes. Organisasi Desa ini menjadi dasar untuk membuat unit usaha baru sehingga kehadiran BUMDes benar-benar dapat menjadi pengungkit untuk menggerakkan roda perekonomian desa menuju peningkatan dan kemajuan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa. Dalam jurnal Nyimas & Susanti (2020) Unit pengendalian air minum memiliki persyaratan khusus untuk pelaksanaan teknis yaitu tertulis pada Peraturan Kepala Desa Ketapanrame Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Pengelolaan BADAN USAHA MILIK



DESA Unit Usaha Sektor Air Minum BPAM Tirto Tentrem. Seiring dengan berjalannya pengelolaan tersebut, maka air minum pedesaan mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas layanan serta meningkatkan keuntungan operasional yang dihasilkan.

BUMDes Ketapanrame memiliki beberapa unit usaha yang mampu mengembangkan perekonomian desa diantaranya adalah (a) pengelolaan Air Minum Bersih (BPAM) Tirto Tentrem mempunyai PAD yang sangat luar biasa dalam mengelola air minum. Sehingga setiap Desa Ketapanrame menjadi desa yang berpendapatan besar dibanding dengan desa-desa yang lainnya, (b) kebersihan lingkungan, BUMDes Ketapanrame juga ikut mengelola dan menjaga kebersihan desa agar terlihat bersih dan indah. Desa Ketapanrame terlihat bersih, nyaman, rapi dan tanpa banjir sampah. (c) hak guna terminal, untuk menjadikan Ketapanrame yang benar-benar daerah pariwisata maka kami menyulap dan memanfaatkan lahan terminal sebagai lahan yang produktif dan selama beberapa tahun ini telah menjadi sebuah kawasan jual beli yang ramai dan menyenangkan dengan pemandangan langsung gunung penanggungan dan menjadi pusat oleh-oleh khas Trawas, (d) Tandon air, air yang dijual kota-kota besar seperti; Surabaya, Lamongan, Gresik, Tuban, Madura dan lain-lain. Hampir 85% adalah dari sumber mata air Trawas yang terkenal jernih dan mengandung rendah TDS (*Total Dissolve Solid*) hal ini lah yang menjadikan pengurus BUMDes Ketapanrame memanfaatkan peluang untuk bisa meningkatkan PAD Desa Ketapanrame.

Program PAMSIMAS pada awalnya dikelola oleh KP-SPAMS karena beberapa alasan oleh pemerintah desa, sehingga pengelolaan air minum dilakukan

oleh salah satu organisasi desa yaitu BUMDes, kemudian pada 2015 berdasarkan kesepakatan musyawarah bersama antara KKM, Pengelola KP- SPAMS, Pengelola BUMDes, BPD, Pemerintah Desa, perwakilan masyarakat pengguna air dan pihak terkait lainnya, selanjutnya menetapkan bahwa BUMDes yang diserahkan untuk mengelola aset yang diperoleh dari program PAMSIMAS agar dapat digunakan dan disimpan untuk kepentingan masyarakat desa. Hasil dari penggabungan aset ini memberikan dampak yang sangat positif bagi keberlanjutan pengelolaan air minum di Desa Ketapanrame, serta peningkatan kondisi sanitasi di desa tersebut. Pada 27 April 2018 terverifikasi bahwa Desa Ketapanrame telah mendapatkan sertifikat *Open Devecation Free* (ODF) dari Bupati Mojokerto.

Ada juga beberapa penghargaan dari instansi dan lembaga lain:

1. Juara 1 kompetisi Pelaksana Gotong Royong Terbaik di Kabupaten Mojokerto tahun 2018
2. Juara 1 kompetisi BUMDes Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
3. Juara 1 kompetisi Desa Sejahtera ASTRA (DSA) oleh ASTRA Internasional Tahun 2020
4. Kategori 10 Besar Desa *Briliant* se-Indonesia oleh BRI Tahun 2021.

Desa Ketapanrame mengalami perkembangan yang sangat pesat dibanding desa lainnya yang ada di Trawas. Dibantu oleh peran BUMDes dalam pengelolaannya. Ketapanrame berbeda dengan desa lainnya yang berada di Kecamatan Trawas, dimana Desa Ketapanrame memiliki BUMDes yang berperan aktif dalam mengelola pariwisata desanya. Banyak wisata yang terdapat di Kecamatan Trawas, tetapi tidak dikelola dengan baik oleh perangkat desa. Sehingga

wisatanya hanya dikuasai oleh perorangan, dan memperkaya diri sendiri, tidak menambah pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah.

Dalam undang-undang tentang desa dijelaskan, bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan, melalui penyedia pemenuhan kebutuhan pokok, mengembangkan sarana dan prasarana, mengembangkan potensi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam Undang-Undang dikatakan bahwa BUMDes dapat dibentuk oleh pemerintah desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 87).

Menurut Inskeep dalam Sugiarti (2016) dalam konteks pariwisata kelembagaan adalah komponen penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Lembaga yang mengatur himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat diatur oleh lembaga kemasyarakatan. Wujud konkret lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi (Soekanto,1982). Ketetapan permanen dalam lembaga dapat membantu menciptakan stabilitas, konsistensi, dan regulasi perilaku.

Peranan (*role*) adalah aspek dinamis kedudukan (*status*). Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan

suatu peranan (Soekanto,1982). Peran penting lembaga dalam perekonomian adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau mengubahnya menjadi risiko. Kelembagaan berperan dalam regulasi sumber daya serta bagi hasil untuk meningkatkan potensi pariwisata. Ada kebutuhan mendesak akan kehadiran organisasi di sektor pariwisata yang dapat berfungsi sebagai forum dan mesin untuk memfasilitasi dan mengembangkan partisipasi masyarakat di sektor pariwisata.

Berdasarkan program desa wisata, BUMDes idealnya dapat berperan dalam pengembangannya. Peran BUMDes ditinjau dari peran pemerintah maupun swasta dalam pengembangan desa wisata menyangkut tiga hal yaitu, penyadaran, pengorganisasian masyarakat, dan penghantaran sumber daya manusia menurut Sri & Dewi (2014). BUMDes memiliki peluang untuk berperan strategis dalam meningkatkan perekonomian desa, namun pada kenyataannya masih banyak BUMDes yang belum berhasil. Konsep lembaga ekonomi desa yang dikenal dengan BUMDes sebenarnya cukup efektif dalam menciptakan sektor pariwisata masyarakat. Mengingat potensi alam yang kita miliki sangat banyak dan tersebar luas di pedesaan . Keterlibatan masyarakat pada komunitas wisata akan semakin memudahkan interaksi antar wisatawan dengan masyarakat sekitar wisata, serta keterpaduan kepentingan jangka panjang.

Mengembangkan pariwisata khususnya desa wisata perlu adanya inovasi terbaru dan maju guna memperkenalkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki suatu desa. Konsep yang digunakan dalam pembangunan desa di Ketapanrame ini seperti pada konsep *Saemaul Undong* di Korea Selatan dimana ini merupakan sebuah gerakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk

semua orang, terutama di daerah pedesaan. *Saemaul Undong* dikenal sebagai *Community Driven Development* yang telah berhasil merubah cara pandang masyarakat pedesaan, dengan melihat kemajuan dari segi infrastruktur produksi masyarakat dan juga pola pikir masyarakat menggunakan tiga spirit yakni: *dilligence* (etos kerja), *self help* (swadaya), dan *cooperation* (kerja sama). Gerakan ini juga sebagai negara yang kaya dan kuat dengan cara menggabungkan energi dan keterampilan-keterampilan masyarakat sekitarnya. *Korean Overseas Information Center, 1983 dalam Ahmad (2019)*.

Persamaan Korea Selatan dengan Indonesia adalah kedua negara tersebut sama-sama memiliki kekayaan sektor pedesaan berorientasi dengan jumlah ekspor yang melimpah di masa pemerintahan kolonial. Tetapi pembangunan pedesaan di Indonesia tidak berkembang pesat seperti yang dialami Korea Selatan. Di Indonesia daerah yang sudah menerapkan konsep *Saemaul Undong* dalam membangun desa wisata yang maju dan mandiri adalah daerah Yogyakarta, tiga desa di wilayah DIY yakni kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul.

Konsep *Saemaul Undong* mempunyai semangat dalam proses membangun desa yang sama. Kesamaan yang dimaksud adalah dengan pengakuan nilai-nilai lokal dan partisipasi bersama dan kerjasama dengan menggabungkan kepemimpinan memberikan contoh model kehidupan nyata. Sehingga dalam konsep *Saemaul Undong* yang diterapkan di Desa Ketapanrame adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat untuk melakukan pembangunan desa, baik dari tenaga maupun pikiran, sehingga desa dapat menjadi subjek pembangunan sebagaimana paradigma desa membangun yang sebenarnya.

Konsep *Saemaul Undong* digunakan dalam kontes Desa *brilliant* yang diselenggarakan oleh Bank BRI dan PT.Astra, Desa Ketapanrame memperoleh juara Desa *brilliant* di Jawa Timur. Di Indonesia sudah banyak desa yang terlebih dahulu menggunakan konsep *Saemaul Undong* salah satunya adalah desa wisata di daerah Bantul Yogyakarta. Pengembangan desa wisata berbasis *Saemaul Undong* didukung penuh oleh pemerintah, dan kedua kementerian, pemerintah Korea Selatan, kementerian *Interior* berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan Korea dalam mewujudkan desa berbasis IT di Indonesia.

Menteri Desa Indonesia melakukan kerjasama dengan Pemerintah Korea untuk mewujudkan percepatan pembangunan pedesaan di Indonesia. *Saemaul Undong* memiliki 3 prinsip utama yang mendukung nilai gerakan, yaitu kerjasama, mandiri, dan ketekukan. Ketiga prinsip ini diperkenalkan oleh pemerintah Korea kepada masyarakat untuk diterapkan guna menghilangkan kebiasaan buruk yang melekat pada masyarakat pedesaan.

Melalui *Saemaul Undong* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki lingkungan fisik dan kondisi sosial masyarakat pedesaan dengan melibatkan semua sektor, pemerintah dan non-pemerintah yang dijabarkan dalam serangkaian tahapan kegiatan yaitu penanaman nilai dan pembekalan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, perbaikan lingkungan dan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan sosial dan usaha ekonomi lokal, inisiasi dan pengembangan usaha ekonomi lokal nantinya diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu unit usaha BUMDes dan pada akhir masa pemberdayaan akan sepenuhnya diserahkan ke desa.

Penelitian ini mengambil konsep *Saemaul Undong* dalam pengembangan desa wisata yang dilaksanakan oleh BUMDes Ketapanrame, karena merupakan salah satu lembaga daerah yang sangat berperan menjadi jembatan antara masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri. Selain itu, alasan memilih prinsip Saemaul Undong ini karena prinsip ini memang dikhususkan dalam pengembangan desa sehingga dapat menjadi desa wisata yang berkembang dan maju. Hampir semua desa di Indonesia sudah mulai mendirikan BUMDes, tetapi belum banyak yang berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berbagai faktor yang menyebabkan BUMDes di berbagai daerah di Indonesia masih belum berhasil salah satunya yaitu kesalahan pada sumber daya manusianya dan kesalahan dalam memilih pengembangan potensi desa karena masih minimnya pengetahuan serta pemahaman mengenali potensi desa yang dimiliki tersebut.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ingin menganalisis bagaimana konsep *Saemaul Undong* dilakukan dalam pengembangan desa wisata oleh BUMDes di Ketapanrame, serta bagaimana kerja sama antara BUMDes dengan masyarakat dalam mengelola desa wisata Ketapanrame berbasis *Saemaul Undong*. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “Prinsip *Saemaul Undong* Dalam Pengelolaan Desa wisata Oleh BUMDes di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto”

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu,

1. Bagaimana penerapan prinsip *Saemaul Undong* oleh BUMDes Ketapanrame dalam mengembangkan desa wisata?
2. Bagaimana hambatan dalam mengelola Desa wisata Ketapanrame dengan prinsip *Saemaul Undong*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip *Saemaul Undong* oleh BUMDes Ketapanrame dalam mengembangkan Desa wisata.
2. Untuk menganalisis bagaimana Hambatan dalam mengelola Desa wisata Ketapanrame dengan prinsip *Saemaul Undong*?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik penulis maupun pihak lain. Khusus untuk kalangan akademisi dan masyarakat umum yang perlu mengetahui bagaimana menganalisa langkah dan strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya Desa Ketapanrame sudah menuju pada Desa maju dan sejahtera karena Desa wisata berbasis *Saemaul Undong* yang diterapkan sebagai solusi memperkenalkan wisata lokal Desa Ketapanrame melalui destinasi wisata Desa yang diberikan.

### 1. Manfaat Teoritis

Pengembangan konsep tentang administrasi BUMDes dan Kebijakan Publik



yang dibuat oleh Pemerintah Desa dalam mendukung pengembangan BUMDes.

## 2. Manfaat Praktisa

### a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan mengenai pemberdayaan dalam mewujudkan desa wisata untuk pengambilan keputusan kebijakan publik. Dan juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti.

### b. Bagi Instansi Pemerintah BUMDes Desa Ketapanrame

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan pertimbangan dari apa yang sudah dilakukan untuk menentukan pola pemberdayaan masyarakat mandiri serta meningkatkan keakuratan data Pemerintah memberdayakan UMKM masyarakat Desa Ketapanrame agar lebih baik lagi.

### c. Bagi Kampus

Hasil penelitian ini dapat melengkapi bacaan dan referensi yang ada di perpustakaan dan menjadi literatur serta melengkapi referensi sejenis bagi peneliti lain di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dimasa yang akan mendatang.